

**KOHESI WACANA POLITIK PADA “RUBRIK OPINI”  
SURAT KABAR HARIAN *KOMPAS***

**Oleh Yulianto  
NIM 09210144024**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kohesi (gramatikal dan leksikal) yang membangun wacana opini politik yang dilihat dari penanda kohesi gramatikal dan leksikal. Penanda kohesi gramatikal dilihat dari referensi, substitusi, elipsis dan konjungsi. Adapun penanda kohesi leksikal dilihat dari sinonimi, antonimi, hiponimi, repetisi, kolokasi, dan ekuivalensi.

Subjek penelitian ini adalah artikel-artikel opini politik dalam rubrik opini yang terdapat pada surat kabar harian *Kompas* yang berjumlah 5 rubrik opini. Penelitian ini difokuskan pada aspek-aspek (gramatikal dan leksikal) yang menjadi sarana kohesi wacana opini politik pada rubrik opini surat kabar harian *Kompas* tahun 2015 dan peranan aspek-aspek tersebut dalam proses menuju teks yang utuh dan padu. Data diperoleh dengan metode simak yang disertai dengan teknik baca dan pencatatan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode agih yang diikuti oleh teknik bagi unsur langsung. Teknik bagi unsur langsung dilanjutkan dengan teknik lanjutan, yang berupa teknik ganti dan teknik lesap. Keabsahan data diperoleh melalui ketekunan pengamatan dan triangulasi teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kohesi wacana opini politik pada rubrik opini surat kabar harian *Kompas* terdiri dari dua aspek, yakni aspek penanda kohesi gramatikal dan penanda kohesi leksikal. Penanda kohesi gramatikal berupa pengacuan persona, pengacuan demonstratif, substitusi, elipsis dan konjungsi. Pengacuan persona terdiri atas PP1T, PP1J, PP3T, dan PP3J. Pengacuan demonstratif terdiri atas PDW dan PDT. Substitusi terdiri atas SF, SN, dan SD. Konjungsi terdiri atas KSA, KPT, KKO, KPN, KPI, KH, KPL, KW, KS, dan KC. Adapun penanda kohesi leksikal terdiri dari sinonimi, antonimi, hiponimi, repetisi, kolokasi, dan ekuivalensi. Sinonimi terdiri atas SKK, SKF dan SKLKL. Antonimi terdiri atas OK, dan OG. Repetisi terdiri atas RA, RN, dan, REPN. Kata yang diperoleh terdiri dari penanda kohesi gramatikal, berupa pengacuan persona sejumlah 59 kata, pengacuan demonstratif sejumlah 17 kata, substitusi sejumlah 11 kata, elipsis sejumlah 2 kata, dan konjungsi sejumlah 106 kata. Adapun penanda kohesi leksikal berupa sinonimi sejumlah 7 kata, antonimi sejumlah 5 kata, hiponimi sejumlah 1 kata, repetisi sejumlah 27 kata, kolokasi sejumlah 4 kata, dan ekuivalensi sejumlah 9 kata. Jumlah seluruh kata yang ditemukan yaitu, 53 kata.

**Kata Kunci:** Kohesi (gramatikal dan leksikal), Wacana Opini Politik.

# **THE POLITICAL DISCOURSE COHESION "SECTION OPINION"**

## **KOMPAS DAILY NEWSPAPER**

**by Yulianto**

**NIM 09210144024**

### **ABSTRACT**

This study aimed to describe cohesion (grammatical and lexical) that build the discourse of political opinion that visits from his marker grammatical and lexical cohesion. Markers of grammatical cohesion views of reference, substitution, ellipsis and conjunction. As a marker of lexical cohesion views of synonymy, antonym, hiponimi, repetition, collocation, and equivalence.

The subjects were articles of political opinion within the rubric of opinion contained in the daily newspaper Kompas, amounting to 5 rubric of opinion. This study focused on the aspects (grammatical and lexical) is the means of cohesion discourse of political opinion in the opinion section of daily newspapers Kompas 2015 and the role of these aspects in the process towards a complete and coherent text. Data obtained by the method refer accompanied by reading and recording techniques. Methods of data analysis used in this study is the method agih followed by a technique for the direct element. Techniques for direct element followed by advanced techniques, in the form of dressing techniques and techniques vanished. The validity of the data obtained through observation and perseverance triangulation theory.

The results showed that the cohesion of the discourse of political opinion in opinion rubric daily newspaper Kompas consists of two aspects, namely the aspect markers and markers of grammatical cohesion lexical cohesion. Markers cohesion persona grammatical form of this reference, this reference demonstrative, substitution, ellipsis and conjunction. That the reference persona consists of PP1T, PP1J, PP3T, and PP3J. Demonstrative this reference consists of the PDW and PDT. Substitution consists of SF, SN and SD. Conjunction consists of KSA, KPT, Marines, KPN, KPI, KH, KPL, KW, KS, and KC. The marker consists of lexical cohesion of synonymy, antonym, hiponimi, repetition, collocation, and equivalence. Synonymy consists of SKK, SKF and SKLKL. Antonymy consists of OK, and OG. Repetition consists of RA, RN, and, REPN. Said obtained consisting of cohesion grammatical marker, such that the reference persona number of 59 words, this reference number 17 demonstrative word, substitution total of 11 words, ellipsis number two words, and conjunctions total of 106 words. As a marker of lexical cohesion in the form of synonymy number 7 says, antonymy number 5 says, hiponimi number one word, repetition number of 27 words, collocations number four words, and the equivalence number 9 said. The total number of words found, namely, 53 words.

**Keywords:** Cohesion (grammatical and lexical), Opinion Political Discourse.

## **A. PENDAHULUAN**

Bahasa secara umum digunakan sebagai alat komunikasi sosial. Di dalam masyarakat ada komunikasi atau saling hubungan antaranggota. Untuk keperluan itu, dipergunakan suatu wahana yang dinamakan bahasa. Dengan demikian setiap masyarakat dipastikan memiliki dan menggunakan alat komunikasi tersebut diberbagai bidang(Soeparno, 2002:5). Salah satu bidang yang menggunakan bahasa adalah politik khususnya dalam hal komunikasi politik. Komunikasi politik dapat didefinisikan sebagai komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis komunikasi ini, dapat mengikat warganya. Kegunaan komunikasi politik adalah untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat antara sektor sosial masyarakat dengan sektor pemerintahan(Muhtadi, 2008:30).

Hubungan antara sektor pemerintahan dengan masyarakat dapat ditempuh dengan efektif melalui media. Media yang dapat digunakan dalam komunikasi politik adalah rubrik opini dalam media cetak. Dalam rubrik opini, bentuk komunikasi politik yang menarik untuk diteliti adalah pembuatan wacana politik. Hal ini dikarenakan rubrik opini yang berisikan tema politik termasuk dalam klasifikasi wacana politik. Hal ini berdasarkan pendapat Mulyana(2005: 57), yang mengklasifikasikan wacana berdasarkan isi yang dipilah menjadi wacana politik, wacana sosial, wacana ekonomi, wacana budaya, wacana militer, wacana hukum, dan wacana kriminalitas. Lebih lanjut lagi, Mulyana(2005: 56) menjelaskan bahwa isi wacana sebenarnya lebih bermakna sebagai “nuansa” atau “muatan” tentang hal yang ditulis, disebutkan, diberitahukan, atau diperbincangkan oleh pemakai bahasa(wacana).

Dalam rubrik opini proses komunikasi politik bisa berbentuk melalui wacana politik. Politikus mencoba memberikan tanggapan-tanggapan atas kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah. Mereka memberikan pandangan tentang bagaimana fenomena politik yang berkembang di tengah masyarakat untuk ditanggapi dan disikapi. Terkait hal ini, penulis artikel opini perlu membentuk suatu wacana yang baik dan padu agar dapat dipahami oleh publik yang membacanya.

Untuk memperoleh kohesi wacana yang baik dan utuh, diperlukan suatu sarana kohesi. Anton M. Moeliono (via Mulyana, 2005: 26) menyatakan bahwa wacana yang baik dan utuh mensyaratkan kalimat-kalimat yang kohesif. Kohesi dalam wacana diartikan sebagai kepaduan bentuk yang secara structural membentuk ikatan sintaktikal. Mulyana (2005:26) menyatakan bahwa konsep kohesi pada dasarnya mengacu kepada hubungan bentuk. Artinya, unsur-unsur wacana (kata atau kalimat) yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh.

Wacana sebagai dasar pemahaman teks sangat diperlukan oleh masyarakat untuk memahami informasi yang dimuat dalam rubrik opini. Wacana utuh adalah wacana yang lengkap, yaitu yang mengandung beberapa aspek terpadu dan menyatu. Salah satu aspek yang dimaksud, antara lain adalah aspek kohesi dan koherensi.

Kalimat-kalimat yang membangun wacana politik pada opini Surat Kabar Harian *Kompas* memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Keterkaitan itu membawa konsekuensi terjadinya hubungan bentuk dan makna antarkalimat dan atau antarparagraf. Hal itu antara lain karena ada kalimat atau satu paragraf yang dikembangkan dan dijelaskan oleh kalimat atau paragraf lainnya secara kohesif dan koheren. Pola dan sifat kohesif berkaitan dengan bentuk struktural, sedangkan pola koheren berkaitan dengan hubungan isi atau makna secara semantis (Mulyana, 2005:128).

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka deskripsi mengenai kohesi wacana politik yang terdapat dalam rubrik opini ini menarik untuk diteliti. Pada kesempatan ini penulis bermaksud mendeskripsikan kohesi wacana politik yang terdapat pada rubrik opini surat kabar Harian *Kompas* berdasarkan kajian analisis wacana. Mengingat bahwa kohesi pada wacana politik dalam rubrik opini surat kabar Harian *Kompas* perlu dilakukan karena sangat besar manfaatnya, bukan hanya bagi pembaca, melainkan juga bagi para penulis artikel opini, khususnya surat kabar Harian *Kompas*.

Pembentukan opini publik adalah melalui pandangan yang dinyatakan secara terbuka. Terdapat banyak cara yang bisa digunakan untuk menyatakan opini. Tetapi, bahasa baik yang dinyatakan secara lisan ataupun tertulis merupakan bentuk yang paling umum digunakan untuk menyatakan suatu opini. Pernyataan opini juga mensyaratkan keterbukaan sehingga mengundang banyak respon. Tahap menyatakan opini secara terbuka dalam media massa merupakan alat yang relatif paling efektif dan efisien (Muhtadi 2008: 40).

Saat ini Indonesia terdapat banyak surat kabar yang beredar menyajikan berbagai berita dan salah satunya adalah surat kabar harian Kompas. Surat kabar harian Kompas sebagai salah satu harian nasional memiliki banyak kelebihan dibanding dengan koran lainnya. Surat kabar harian Kompas adalah salah satu surat kabar di Indonesia yang bertaraf nasional. Surat kabar harian Kompas merupakan surat kabar yang dapat dipercaya kebenarannya. Keeksisan Surat kabar harian Kompas selama ini menjadi bukti jika Kompas memang layak dikenal sebagai pemimpin pasar bagi koran-koran yang lain, dalam arti harga langganan dan harga ecerannya tertinggi diantara koran lainnya sehingga koran lain tidak berani melebihi harganya. Sebagai harian yang menjadi pemimpin pasar, sudah semestinya Kompas memiliki mutu yang sudah tidak diragukan lagi. Baik dari isinya maupun dari unsur kebahasaannya. Harian Kompas selalu menyajikan berita-berita terkini yang terjadi selama satu hari sebelumnya.

Penulis tertarik untuk meneliti rubrik opini di SKH *Kompas* didasarkan atas pertimbangan bahwa rubrik ini dipakai sebagai ajang komunikasi antaranggota masyarakat, khususnya yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat. Selain itu, permasalahan yang diangkat dalam artikel merupakan permasalahan yang sedang menjadi sorotan publik pada saat itu. Masalah-masalah yang berkaitan dengan wacana politik yang menarik untuk dikaji di rubrik opini di antaranya adalah Pembangunan Pasca Kapitalis.

Masalah tersebut menarik untuk dikaji dikarenakan adanya perubahan sistem pembangunan yang bersifat kapitalis menjadi liberalis. Dalam hal ini perubahan sistem yang dulunya hanya memberikan keuntungan kepada segelintir dan resiko ditanggung banyak kalangan. Pada Pilpres 2014, kemunculan Jokowi

dapat disebut sebagai “pimpinan pasca elit(*post-elite leader*)” karena dia merupakan dari golongan rakyat tanpa mengontrol satupun partai politik. Kemunculan Jokowi lebih mengungkapkan “eksperimen politik rakyat” mendudukkan kalangan sendiri(rakyat) memimpin bangsa ini, tanpa mempersoalkan sistem ekonomi yang berlaku.

Seorang pihak menulis di rubrik opini agar wacana politik tentang pembangunan pasca kapitalis yang diusungnya dapat dipahami dan diikuti oleh publik secara luas. Rubrik opini menjadi menarik karena merupakan sarana yang sangat baik dalam rangka mengunggah wacana politik tersebut ke dalam kehidupan masyarakat. Hal ini mengingat rubrik opini, khususnya di SKH *Kompas* dapat begitu banyak dibaca oleh masyarakat. Tujuan dari proses ini adalah agar sang penulis di rubrik opinidapat mengajak sebanyak-banyaknya masyarakat untuk memahami wacana ataupun pendapat politiknya secara padu dan utuh sehingga masyarakat dapat mempercayai, bahkan dapat menjadi pengikut dari pandangan politik dari penulis rubrik opini. Dalam rangka inilah, kohesi wacana sangat penting untuk diteliti. Kohesi wacana menentukan seberapa besar kephahaman yang diterima oleh masyarakat. Agar masyarakat dapat memahami wacana dari sang penulis dengan baik, sang penulis memerlukan pengetahuan dan penguasaan kohesi yang baik. Tarigan (2009: 93) mengemukakan penguasaan kohesi tidak hanya bergantung pada pengetahuan kita tentang kaidah-kaidah bahasa, tetapi juga pengetahuan mengenai realitas, pengetahuan kita dalam proses penalaran yang disebut penyimpulan sintaktik. Suatu teks atau wacana benar-benar bersifat kohesif apabila terdapat kesesuaian secara bentuk bahasa (*language form*) terhadap ko-teks (situasi dalam bahasa; sebagai lawan dari konteks atau situasi-luar bahasa). Dengan kata lain, ketidaksesuaian bentuk bahasa dengan koteks dan juga dengan konteks, akan menghasilkan teks yang tidak kohesif.

Singkatnya, kohesi wacana merupakan serangkaian pengetahuan yang penting untuk dipunyai agar dapat menghasilkan wacana politik yang mudah dipahami masyarakat. Tanpa pengetahuan akan kohesi wacana, sebuah wacana

politik tidak akan mampu bertahan lama sehingga tidak akan ditindaklanjuti dalam kehidupan nyata.

Penelitian ini menganalisis kohesi wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kompas*. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan berupa analisis deskripsi kualitatif terhadap kaidah Bahasa Indonesia, terutama dalam hal analisis kohesi wacana.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan teoretis dan pendekatan metodologis. Pendekatan teoretis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana. Menurut Stubbs (dalam Darma 2009:15) menyatakan analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti dan menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik secara lisan atau tulis, misalnya pemakaian bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Analisis wacana menekankan kajiannya pada penggunaan bahasa dalam konteks sosial, khususnya dalam penggunaan bahasa. Dari segi internal wacana dikaji dari jenis, struktur, dan hubungan bagian-bagiannya. Dari segi eksternal, wacana dikaji dari segi keterkaitan wacana itu dengan pembicara, hal yang dibicarakan, dan mitra bicara. Tujuan analisis wacana adalah untuk mengungkap kaidah kebahasaan yang mengkonstruksi wacana, memproduksi wacana, memahami wacana, dan melambangi suatu hal dalam wacana. Tujuan analisis wacana adalah untuk memberikan wacana (sebagai salah satu eksponen bahasa) dalam fungsinya sebagai alat komunikasi. Wacana yang digunakan dalam penelitian ini adalah wacana berita yang akan dicari unsur kesinambungan wacananya.

Pendekatan kedua dalam penelitian ini adalah pendekatan metodologis berupa pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif menurut Sudaryanto (1992:63) adalah pendekatan yang lebih menandai pada hasil penelitian yang bersangkutan dengan bahasa dengan cara menandai cara penggunaan bahasa tahap demi tahap, langkah demi langkah. Adapun pendekatan kualitatif berkaitan dengan data yang tidak berupa angka-angka, tetapi berupa bentuk bahasa.

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini sebagai prosedur dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan masalah. Deskripsi masalah terhadap objek penelitian yang dipilih didasarkan pada fakta-fakta apa adanya. Pendekatan ini digunakan dengan maksud untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh peneliti, yaitu faktor penyebab terjadinya kesinambungan wacana dan wujud kesinambungan wacana yang terdapat pada wacana berita.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini, akan dibahas tentang penanda kohesi gramatikal yang terdiri atas referensi (pengacuan), penyulihan (substitusi), pelesapan (elipsis), dan perangkaian (konjungsi) sedangkan penanda kohesi leksikal terdiri atas sinonimi, antonimi, hiponimi, repetisi, kolokasi, dan ekuivalensi.

#### **1. Penanda Kohesi Gramatikal**

##### **a. Referensi (pengacuan)**

Halliday dan Hasan (1976:31) menjelaskan referensi yaitu informasi yang bercirikan khusus ditandai dengan pencarian kembali. Pada referensi, informasi yang dicari adalah makna referensial yaitu kelas suatu benda atau referen yang diacunya. Dalam wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kompas* terdapat tiga jenis pengacuan, yaitu pengacuan persona, pengacuan demonstratif, dan pengacuan komparatif.

##### **1) Pengacuan persona**

Halliday dan Hasan (1976: 37 & 43) mengungkapkan referensi tersebut dikenal sebagai persona yang dibedakan berdasarkan perannya dan kemudian dikenal dengan istilah orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Dalam wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kompas* ditemukan empat jenis pronomina, yaitu pronomina persona pertama tunggal, pronomina persona

pertama jamak, pronomina persona ketiga tunggal, dan pronomina persona ketiga jamak. Berikut ini contoh data yang ditemukan dalam penelitian.

**a) Pronomina persona pertama tunggal**

(01) Dalam teori hukum organisasi pemerintah, **Presiden** diberikan wewenang konstitusional ataupun UU Kementrian membentuk struktur kabinet yang mencerminkan kebutuhan melaksanakan tugas negara dalam masa jabatan presiden. Setelah membentuk struktur kabinet presiden melakukan konstribusi wewenang secara horizontal untuk mengatribusikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepada tiap kementrian/atau lembaga (03/MSK/9/11/15).

Pada data (01) kata **Presiden** mengacu pada pronomina persona pertama tunggal endofora, karena memiliki acuan di dalam teks yaitu wewenang seorang presiden untuk pembentukan kabinet.

**b) Pronomina persona pertama jamak**

(02) Menghadapi dilema ini, **kita** perlu menemukan resolusi yang tepat bagaimana menghadirkan persatuan di tengah perbedaan, atau kebaikan umum di tengah pluralitas, atau sebuah formasi sosial yang ideal sebagaimana digambarkan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika (05/MDA/9/11/15).

Pada data (02) kata **kita** mengacu pada pronomina persona pertama jamak endofora, karena memiliki acuan di dalam teks yaitu kesiapan warga negara untuk membangun kesadaran nasionalismenya.

**c) Pronomina persona ketiga tunggal**

(03) **Grindle** meyakini semua bermuara pada motivasi auctor-auctor politik. **Asumsinya** adalah, pertama, sangat dipengaruhi oleh perilaku politik para auctor tersebut. Kedua, sama sekali bukan diarahkan untuk menciptakan nilai baru dalam distribusi kekuasaan di antara mereka, melainkan melanggengkan yang ada dengan wajah baru.

Ketiga tidak ada yang mampu mengantisipasi apa yang terjadi, atau tidak adanya kemampuan untuk memprediksi apa yang akan terjadi sehingga amat tergantung pada kompetisi antar-aktor politik itu sendiri (05/SPRO/03/11/15).

Pada data (03) satuan lingual kata **misinya** merupakan pronomina persona ketiga tunggal bentuk terikat lekat kanan **-nya** juga merupakan pengacuan endoforis karena memiliki acuan yang berada di dalam teks.

#### **d) Pronomina persona ketiga jamak**

(04) Pertama, menyangkut dimensi kepentingan publik luas dan merupakan derivat langsung perintah UU, hal itu dapat dituangkan dalam peraturan presiden. Kedua, jika kebijakan bersama itu lebih memperlihatkan karakter teknis administratif, Hal itu bisa dituangkan dalam peraturan bersama antarmentri/pemimpin lembaga eksekutif, Ketiga jika kebijakan yang dihasilkan hanya dimaksudkan sebagai pegangan oprasional bagi **para pejabat pemerintahan** (kementrian/lembaga atau dinas di daerah), bisa dipilih produk peraturan kebijakan, seperti surat edaran bersama, jukla, juknis, atau pedoman (9/MSK/9/11/15).

Pada data (04) satuan lingual **para pejabat pemerintahan** mengacu pada pronomina persona ketiga jamak endoforis, karena masih mengacu pada teks.

## **2) Pengacuan demonstratif**

Referensi demonstratif menurut Halliday dan Hasan (1976:37) adalah referensi yang mengacu kepada lokasi atau berdasar kepada jarak kedekatannya. Unsur-unsur referensi demonstratif adalah *'this'* (ini, tunggal) *'these'* (ini, jamak) dan *'here'* (di sini), menunjukkan benda yang sedang dibicarakan dekat dengan si pembicara. Namun, *'that'*, *'those'* dan *'there'* menunjukkan benda yang jauh dari si pembicara. Apabila dibedakan berdasarkan jamak dan tunggalnya maka *'this'* dan *'that'* merupakan bentuk tunggal sedangkan *'these'* dan *'those'* merupakan

bentuk jamak. Dalam wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kompas* ditemukan dua pronomina, yaitu pronomina demonstratif waktu dan pronomina demonstratif tempat yang dapat dilihat pada data (02) dan (03) berikut ini.

(05) Pemilihan kepala daerah serentak untuk pertama kalinya akan digelar pada **Desember 2015**. Waktu yang sangat singkat untuk mempersiapkannya. Pilihan pilkada serentak merupakan respon atas jalannya pilkada langsung selama ini yang bergantung pada priode kepemimpinan masing-masing di tiap daerah otonomi (01/PSRO/03/11/15).

(06) Momen peringatan Sumpah Pemuda Ke-87 **tahun ini** terasa kurang diisi semangat baru persatuan Indonesia ditengah tantangan yang dihadapi bangsa.

Mengenang sejarah rintisan persatuan bangsa di **masa lalu** itu akan lebih terasa bermakna kalau peristiwa itu kita tempatkan dalam konteks tantangan terkini yang dihadapi bangsa dalam mewujudkan persatuan di masyarakat demokratis. Apa tantangan utama yang dihadapi bangsa di era demokrasi sekarang untuk mewujudkan persatuan itu? (01/MDA/09 /11/15).

(07) Jadilah **Indonesia** sebagai satu-satunya negara penyelenggara pilkada serentak di dunia ini, kelak. Sistem pilkada baru ini diyakini sukses jika efisiensi dapat diraih sembari mengatasi terjadinya petualangan politik sesaat, yang sering kali terjadi pada **masa lalu** (02/PSRO/03/11/15).

(08)Meski saya kurang tertarik dengan pandangan deterministik seperti ini, boleh juga model ini diterapkan di **Indonesia**. Para koruptor perlu dijadikan sampel penelitian, apakah mereka mempunyai struktur otak tertentu yang tidak dimiliki orang kebanyakan sehingga meskipun hukum makin tegas, keberanian

menilap tak kunjung menciut. Para mafia tambang juga layak dijadikan sampel. Penggalan merkuri di **Maluku** sampai saat ini masih berlangsung, padahal pemerintah telah melarang keras(Kompas, 14/11) (03/SOWP/18/11/15)

Pada data (05) satuan lingual kata **Desember 2015** merupakan pronomina demonstratif waktu yang mengacu pada tanggal dimana akan dilaksanakan Pemilu serentak. Pada data (06) terdapat kata **tahun ini** dan **masa lalu** merupakan tanda pronomina demonstratif waktu yang menunjukkan waktu saat ini ketika dilaksanakan Sumpah Pemuda di tahun ini dan membandingkan dengan waktu lampau. Lebih lanjut, satuan lingual kata **Indonesia** dan **Maluku** pada data (07) dan (08) adalah pronomina demonstratif tempat secara eksplisit karena menunjukkan negara dan pulau.

#### **b. Substitusi (penyulihan)**

Substitusi atau penyulihan adalah penggantian suatu unsur bahasa dengan unsur bahasa lain. Substitusi juga diartikan sebagai hubungan antara kata dan kata lain yang digantikannya. Substitusi tersebut biasanya dilakukan untuk menghindari adanya pengulangan dari kata yang sama. Substitusi adalah pengambilalihan atau pertukaran bagi sesuatu segmen kata, frasa atau klausa oleh kata ganti yang lainnya. Pada wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kompas* ditemukan substitusi nominal, substitusi frasa, dan substitusi dengan penyebutan secara definit berikut ini.

##### **a) substitusi nominal**

(09) Setiap **pejabat pemerintah** dalam hukum administrasi negara disebut sebagai administrasi negara. Administrare dalam bahasa latin berarti 'melayani'. **Mereka** tak lebih adalah pelayan masyarakat di era pemerintahan pasca elitis ini yang harus mendengar dengan telinga rakyat, dan berbicara sebagai kepanjangan lidah rakyat. (11/MSK/09/11/15)

Tampak pada data (09), kata **Mereka** merupakan konstituen penyulih dari frasa yang sama, yaitu **pejabat pemerintah**. Penyulihan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi pengulangan bentuk-bentuk satuan lingual yang sama dalam sebuah wacana, sehingga dapat menghilangkan kemonotonan.

#### **b) substitusi frasa**

(10) **Grindle** meyakini semua bermuara pada motivasi auctor-auctor politik. **Asumsinya** adalah, pertama, sangat dipengaruhi oleh perilaku politik para auctor tersebut. Kedua, sama sekali bukan diarahkan untuk menciptakan nilai baru dalam distribusi kekuasaan di antara mereka, melainkan melanggengkan yang ada dengan wajah baru. Ketiga tidak ada yang mampu mengantisipasi apa yang terjadi, atau tidak adanya kemampuan untuk memprediksi apa yang akan terjadi sehingga amat tergantung pada kompetisi antar-auctor politik itu sendiri.

Pada data (10) **-nya** pada kata **asumsinya** merupakan konstituen penyulih dari kata **Grindle**. Penyulihan tersebut berarti asumsi dari Grindle.

#### **c) substitusi dengan penyebutan secara definit**

(11) Mental banal seperti ini sudah menjadi watak politik kita. Kalau saja benar bahwa letak masalahnya pada struktur otak, kerja KPK, kepolisian, dan kejaksaan akan lebih ringan. Karena yang akan kita butuhkan hanyalah mesin pencuci otak. Namun, faktanya, **korupsi dan jejaring mafia** adalah **kotak pandora yang bahkan lebih rumit dari kerja otak manusia**.

Pada data (11) terdapat kata penjelasan bahwa korupsi merupakan suatu hal yang rumit untuk dipecahkan layaknya sebuah kotak pandora.

#### **c. Elipsis (pelesapan)**

Halliday dan Hasan (1976: 146) menyatakan bahwa elipsis merupakan sesuatu yang dilesapkan dan tidak disebutkan. Elipsis tidak menyebabkan teks

menjadi sulit untuk dipahami. Dalam wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kompas* ditemukan pelesapan pada data (11) berikut ini.

(11a) Para ahli tentu berbeda pandangan soal ini, tetapi ada kesimpulan, misalnya, bagian otak yang berhubungan dengan ikatan sosial bekerja secara berbeda pada **orang** Republik dan Ø Demokrat. Ikatan sosial orang Demokrat cenderung luas, sedangkan orang Republik cenderung terbatas pada keluarga dan Negara. (02/SOWP/18/11/15).

Unsur yang dilesapkan pada data (11a) yaitu satuan lingual pada kata persoalan. Pelesapan pada data (11a) terjadi tiga kali. Dalam data (11a) pelesapan digunakan untuk efektivitas dan efisien dalam berbahasa. Jika dituliskan secara lengkap, bentuk wacana itu dapat dilihat pada data (11b) di bawah ini.

(11b) Para ahli tentu berbeda pandangan soal ini, tetapi ada kesimpulan, misalnya, bagian otak yang berhubungan dengan ikatan sosial bekerja secara berbeda pada **orang** Republik dan **orang** Demokrat. Ikatan sosial orang Demokrat cenderung luas, sedangkan orang Republik cenderung terbatas pada keluarga dan negara(02/SOWP/18/11/15).

#### **d. Konjungsi**

Konjungsi adalah alat kohesi gramatikal yang berfungsi menghubungkan satu gagasan dengan gagasan yang lain. Konjungsi berperan untuk menandai hubungan antarbagian dari sebuah teks sehingga teks tersebut dapat dipahami sepenuhnya. Berikut pemakaian konjungsi sebagai alat kohesi gramatikal yang ditemukan dalam wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kompas*

##### **1) Sebab-Akibat**

Sebab dan akibat merupakan dua kondisi yang berhubungan. Hubungan sebab-akibat terjadi apabila salah satu proposisi menunjukkan penyebab terjadinya suatu kondisi tertentu yang merupakan akibat atau sebaliknya (Rani

dkk, 2006: 122). Penanda konjungsi sebab-akibat ditemukan pada data (12) berikut ini.

(12) Bagaimana menghadirkan persatuan di tengah berkembangnya perbedaan atau pluralitas di masyarakat demokratis merupakan persoalan krusial yang dihadapi pembangunan bangsa sekarang . Pluralitas berarti tiadanya lagi konsep tunggal tentang kebaikan umum(common goods) **karena** berkembang perbedaan pandangan tentang kebaikan umum di masyarakat. (02/MDA/09 /11/15)

Konjungsi sebab-akibat pada data (12) yaitu **karena**. Satuan lingual kata **karena** menunjukkan hubungan sebab-akibat. Karena berkembangnya pandangan tentang kebaikan umum di masyarakat, menjadi sebab dari munculnya pluralisme dalam masyarakat.

## 2) Pertentangan

Hubungan pertentangan terjadi apabila ada dua proposisi atau ide yang menunjukkan pertentangan atau kekontrasan. Untuk menyatakan hubungan pertentangan dapat digunakan kohesi konjungsi pertentangan (Rani dkk, 2006:120). Penggunaan konjungsi pertentangan dapat dilihat pada data (13) di bawah ini.

(13) Di masyarakat demokratis persatuan tidak bisa dihadirkan dengan menghilangkan perbedaan, melakukan penyeragaman, menghadirkan absolutism, atau totalitas pandangan , karena dengan itu akan disertai eksklusivisme yang menghambat terbentuknya persatuan. **Sebaliknya**, membiarkankan pluralitas apa adanya , yang dengan itu akan berkembang eksklusivisme ,masing-masing tanpa disertai penyatuan untuk mencapai tujuan bersama juga bukan pilihan yang dibenarkan dalam pembangunan bangsa menuju terbentuknya masyarakat demokratis. (04/MDA/09 /11/15)

Konjungsi **sebaliknya** pada data(13) juga mengandung makna pertentangan yaitu preposisi masyarakat demokratis terbentuk jika membiarkan

pluralisme apa adanya, namun di sisi lain akan berkembang eksklusifisme. Dalam hal ini ada pertentangan antara dua paham yang dapat menghambat terciptanya masyarakat demokratis.

### 3) Konsesif

Adakalanya penulis artikel opini politik memaparkan suatu kelemahan atau kekurangan yang terjadi diluar jalur pokok tema yang sedang dibicarakan. Pengakuan kelemahan tersebut dapat diwujudkan dengan menggunakan konjungsi konsesif (Rani dkk, 2006: 126). Satuan lingual penanda konjungsi konsesif yang ditemukan dalam penelitian ini berupa satuan lingual kata **meskipun, meski, walaupun**. Penggunaan konjungsi konsesif dapat dilihat pada data (14) berikut ini.

(15) Konflik sosial yang merebak di masyarakat Indonesia sekarang, **meski** telah memasuki demokrasi, dan karena itu bias disebut sebagai paradox demokrasi, bisa dibaca sebagai ketiadaan kelembagaan politik yang mampu menghadirkan persatuan ditengah perbedaan, atau menghadirkan kebaikan umum di tengah pluralisme, atau menghadirkan ketiadaan pelembagaan demokrasi dalam kehidupan sosial. Ketidadaan kelembagaan demokratis ini bisa dibaca pula sebagai bentuk absennya Negara demokratis dalam menciptakan kebaikan publik. (07/MDA/09/11/15)

Pada data (15) ditemukan hubungan secara konsesif melalui konjungsi **meski**. Konjungsi **meski** mengandung hubungan konsesif, yaitu meski menyatakan telah memasuki era demokrasi, namun masih merebak konflik sosial di Indonesia. Bentuk **meski** yang terdapat pada kalimat tersebut adalah penanda konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan antarkalimat.

### 4) Penambahan (aditif)

Pada waktu memberikan informasi, penulis opini terkadang tidak menyampaikan seluruh informasi dengan menggunakan satu kalimat saja. Dalam hal ini, penulis opini menyampaikan informasinya secara bertahap. Informasi

yang disampaikan dengan menggunakan suatu kalimat perlu ditambah lagi. Informasi tambahan itu kadang-kadang tampak lepas dari informasi sebelumnya (Rani dkk, 2006: 118). Oleh karena itu, agar kalimat itu tampak berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, perlu digunakan konjungsi tambahan. Satuan lingual penanda konjungsi penambahan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu **dan** pada data (16) berikut ini.

(16) Kerangka kerja demokratis ini , di satu sisi, memperkuat hak-hak, otonomi, **dan** kebebasan individual. Sementara di sisi lain juga mengaktivasi hak-hak, otonomi, **dan** kebebasan itu di ranah publik atau penentuan kebijaksanaan.(12/MDA/09 /11/15)

Untuk menghubungkan bagian yang memberikan informasi atau keterangan tambahan, pada data (16) digunakan konjungsi **dan**. Kalimat diantaranya; kerangka kerja dapat memperkuat hak-hak otonomi dan kebebasan individual diberikan tambahan informasi pada kalimat selanjutnya, yaitu mengaktivasi hak-hak, otonomi, dan kebebasan itu di ranah publik atau penentuan kebijaksanaan.

### **5) Pilihan**

Pada waktu memberikan informasi, penulis opini terkadang tidak menyampaikan seluruh informasi dengan menggunakan satu kalimat saja. Dalam hal ini, penulis opini menyampaikan informasinya secara bertahap. Informasi yang disampaikan dengan menggunakan suatu kalimat perlu ditambah lagi. Namun, penulis kadang memberikan suatu kalimat pilihan untuk menyempurnakan tulisannya. Konjungsi pilihan adalah bentuk konjungsi koordinatif yang menghubungkan dua unsur yang sederajat yang fungsinya untuk memilih. Satuan lingual penanda konjungsi pilihan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu **atau** pada data (17) berikut ini.

(17) Melalui formula pembentukan masyarakat demokratis seperti itu, kerangka kerja demokratis menciptakan persatuan di tengah perbedaan dengan mengakui konflik untuk dikelola,**atau** konflik dalam consensus.

Kebiasaan semacam ini perlu dimiliki di masyarakat demokratis dalam bersikap menghadapi perbedaan, termasuk perbedaan pandangan politik.  
(13/MDA/09 /11/15)

Pada data(17) ditemukan konjungsi **atau**, kalimat di atas dijelaskan bahwa untuk menciptakan persatuan di tengah perbedaan dapat dilakukan dengan pengakuan konflik untuk dikelola atau konflik dalam consensus.

### **6) Harapan**

Hubungan optatif terjadi apabila ada ide atau proposisi yang mengandung suatu harapan atau doa (Rani dkk, 2006: 123). Satuan lingual penanda konjungsi harapan yaitu **semoga**. Konjungsi harapan dapat dilihat pada data (18) berikut ini.

(18) Kunci utama tata lembaga baru adalah perlunya pemahaman oleh semua elemen, termasuk jajaran birokrasi lokal dan nasional, mengenai nilai baru apa yang ingin diraih dalam pilkada serentak. Niscaya, dari sini program-program antisipatif akan ditetapkan dengan sendirinya, mengikuti nilai-nilai baru. Akhirnya kelak pilkada pun terlembagakan dengan wajah baru. **Semoga!** (13/PSRO/03/11/15)

Konjungsi **semoga** dalam data (18) mengandung makna harapan. Dalam data tersebut diketahui bahwa penulis mengharapkan adanya pemahaman semua elemen masyarakat tentang hukum Pemilu, sehingga kelak tercipta Pemilu yang bersih dari kecurangan.

### **7) Perlawanan**

Hubungan perlawanan adalah hubungan yang menyatakan bahwa apa yang dinyatakan dalam proposisi pertama berlawanan, atau tidak sama, dengan apa yang dinyatakan dalam proposisi selanjutnya. Penanda hubungan perlawanan adalah satuan lingual kata **melainkan**. Penggunaan konjungsi perlawanan dapat dilihat pada data (19) berikut ini.

(19) Grindle meyakini semua bermuara pada motivasi aktor-aktor politik. Asumsinya adalah, pertama, sangat dipengaruhi oleh perilaku politik

para auktor tersebut. Kedua, sama sekali bukan diarahkan untuk menciptakan nilai baru dalam distribusi kekuasaan di antara mereka, **melainkan** melanggengkan yang ada dengan wajah baru. Ketiga tidak ada yang mampu mengantisipasi apa yang terjadi, atau tidak adanya kemampuan untuk memprediksi apa yang akan terjadi sehingga amat tergantung pada kompetisi antar-auktor politik itu sendiri. (05/PSRO/03/11/15).

Pada data (19) terdapat dua konjungsi perlawanan yang ditandai dengan satuan lingual kata **melainkan**. Disebutkan pada data (12) adanya tiga asumsi yang dipertentangkan mengenai watak atau mental para pejabat yang berkompetisi dalam politik.

### **8) Waktu**

Konjungsi yang berfungsi untuk menjelaskan antar dua hal atau peristiwa. Kata-kata yang bersifat temporal ini dapat menjelaskan hubungan yang tidak sedrajat ataupun sedrajat. Pada data (20) dapat ditemukan konjungsi waktu sebagai berikut.

(20) Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli sehari **setelah** diangkat jadi menteri bergesekan dengan Wakil Presiden Jusuf Kala dan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait kritik Rizal mengenai rencana Garuda membeli 30 pesawat Airbus A350 dan proyek listrik 35000 MW. (01/MSK/09/11/15)

Pada data (20) ditemukan konjungsi waktu **setelah**. Konjungsi waktu tersebut menunjukkan bahwa Rizal Ramli bergesekan pendapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kala setelah ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman.

### **9) Syarat**

Hubungan syarat terjadi apabila proposisi yang satu menyatakan syarat terlaksananya apa yang disebut dalam proposisi sebelumnya. Satuan lingual penanda hubungan syarat adalah **bila**. Penggunaan konjungsi syarat dapat dilihat pada data (21) berikut ini

(21) Rakyat akan menerima hasil pemilu sebagai legitimasi secara politik dan hukum tak hanya **bila** hasil pemilu berintegritas (bukan hasil manipulasi, tetapi hasil perhitungan jujur), tetapi juga **bila** semua pelanggaran hukum pemilu ditegakkan secara adil dan tepat waktu. Untuk menjamin ini, perlu peraturan perundang-undangan yang mengatur dua hal. Pertama, perundang-undangan yang mengatur lengkap ketentuan administrasi pemilu dan ketentuan pidana pemilu yang dapat tuntas ditegakkan beberapa hari sebelum KPU menetapkan dan mengumumkan hasil pemilu. Kedua, peraturan perundangan yang mengatur satu atau dua institusi dan mekanisme penegakan ketentuan administrasi pemilu dan ketentuan pidana pemilu. (05/UKUUP/19/11/15)

Konjungsi **jika** pada data (21) menunjukkan hubungan syarat. Proposisi jika ada pemahaman bahwa rakyat akan menerima hasil pemilu jika hasil pemilu merupakan hasil mutlak bukan hasil manipulasi.

## **2. Penanda Kohesi Leksikal**

Telah diuraikan di atas bahwa selain aspek kohesi gramatikal, pada bagian ini akan dibahas pula mengenai aspek kohesi leksikal. Kohesi leksikal adalah hubungan leksikal antara bagian-bagian wacana untuk mendapatkan keserasian struktur secara kohesif (Mulyana, 2005: 29). Berdasarkan hasil analisis ditemukan beberapa aspek kohesi leksikal, yaitu sinonimi, antonimi, hiponimi, repetisi, kolokasi, dan ekuivalensi.

### **a. Sinonim**

Sinonimi adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk yang lain. Meskipun sinonim menunjukkan kesamaan arti kata, sesungguhnya arti kata-kata itu tidaklah sama betul, Kridalaksana (2001: 222). Menurut Halliday dan Hasan (1976: 278) sinonimi dapat diartikan sebagai nama lain untuk benda atau hal yang sama atau ungkapan yang maknanya kurang lebih

sama dengan ungkapan lain. Dalam wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kompas* ditemukan sinonimi pada data (22) berikut ini.

(22) Ada beberapa hambatan kondisional yang penting kita diskusikan. Pertama, institusi politik kita belum sepenuhnya bersih dari warisan Orde Baru. **Suap** dan **sogokan** masih mungkin terjadi di dalam birokrasi. Terobosan revolusi mental Joko Widodo masih terbatas pada tataran atas, presiden, dan lingkarannya. Pada teras birokrasi, terobosan ini belum membumi. Tentu karena pemerintah baru berjalan setahun. Namun, inilah salah satu akar iblisnya, the root of evils. (07/SOWP/18/11/15)

Pada data (22) ditemukan sinonim antara kata dengan kata. Pada data (22) lingual kata **suap** bersinonim dengan kata **sogokan**. Pada konteks wacana politik suap dan sogokan merupakan sinonim yang mengacu pada kata uang.

#### **b. Antonim**

Antonimi disebut juga oposisi makna. Pengertian oposisi makna mencakup konsep yang betul-betul berkawanan sampai kepada yang hanya kontras makna saja (Sumarlam, 2004: 169). Dalam wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kompas* ditemukan antonimi pada data (23) berikut ini.

(23) Transaksi jual-beli suara yang ketahuan dan terungkap ke permukaan pada pemilu 2014, apalagi yang tak ketahuan, menunjukkan praktik ini merupakan produk dari sistem daripada produk tingkah laku menyimpang dari sejumlah orang. Ketiga kelemahan ini akan dapat diatasi dalam Kitab Hukum Pemilu dengan menawarkan sistem pemilu proporsional yang lebih sederhana baik dalam tata cara pemberian suara maupun rekapitulasi hasil penghitungan suara, tetapi tanpa insentif untuk transaksi **jual-beli** suara pada siapa pun. (15/UKUUP/19/11/15)

Pada data (23) terdapat oposisi relasional (kebalikan) dan oposisi inversi. Pada data (23) terdapat oposisi relasional antara kata **jual** dan **beli**.

### c. Hponim

Hiponimi adalah semacam relasi antar kata yang berwujud atas-bawah, atau dalam suatu makna terkandung sejumlah komponen yang lain (Keraf, 2004: 38). Dalam wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kompas*di temukan hiponimi pada data (24) berikut ini.

(24) Keempat, sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu selama ini belum mampu mencapai putusan yang adil dan tepat waktu baika karena pengaturan pemilu masih mengandung kekosongan hukum (sampai kini belum ada rumusan jelas mengenai ketentuan administrasi pemilu, hukum acara, dan sanksinya) maupun karena terlalu banyak instansi yang terlibat dalam proses **penegakan hukum (Bawaslu, KPU, Polri, Kejaksaan, PN dan PUTN, DKPP, dan MK)**. Salah satu substansi Kitab Hukum Pemilu adalah mengisi kekosongan hukum perihal ketentuan administrasi pemilu, dan penyederhanaan sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu. Sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu yang diusulkan adalah Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dihapuskan, fungsi pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu dikembalikan kepada semua unsur masyarakat; dan Bawaslu di transformasikan menjadi Komisi Penegak Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu (KPH\_PSP).( 13/UKUUP/19/11/15)

Pada data (24) ditemukan lingual kata **penegakan hukum** sebagai hipernim dari **Bawaslu, KPU, Polri, Kejaksaan, PN,dan PTUN, DKPP, dan MK**.

### d. Repetisi

Repetisi adalah perulangan bunyi, suku kata, kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk diberikan tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai (Keraf, 2004: 127). Dalam wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kompas* ditemukan repetisi pada data (25) berikut ini.

(25) Momen peringatan Sumpah Pemuda Ke-87 tahun ini terasa kurang diisi semangat baru persatuan Indonesia ditengah tantangan yang dihadapi

bangsa. Mengenang sejarah rintisan persatuan bangsa di masa lalu itu akan lebih terasa bermakna kalau peristiwa itu kita tempatkan dalam konteks tantangan terkini yang dihadapi bangsa dalam mewujudkan **persatuan** di masyarakat demokratis. Apa tantangan utama yang dihadapi bangsa di era demokrasi sekarang untuk mewujudkan **persatuan** itu? (01/MDA/09/11/15)

Pada data (25) kata **persatuan** diulang dua kali. Kata yang diulang tersebut untuk menekankan pentingnya makna dalam konteks kutipan itu.

#### **e. Kolokasi**

Kolokasi atau sanding kata adalah asosiasi tertentu dalam menggunakan pilihan kata yang cenderung digunakan berdampingan. Kata-kata berkolokasi adalah kata-kata yang cenderung dipakai dalam suatu domain atau jaringan tertentu (Sumarlan, 2004: 144). Dalam wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kompas* ditemukan kolokasi pada data (26) berikut ini.

(26) Dari keempat aspek, aspek pertama (hukum pemilu) merupakan aspek paling penting karena lima alasan. Pemilu merupakan persaingan antarpeserta untuk memperebutkan jabatan yang jumlahnya sedikit. Karena yang memperebutkan jauh lebih banyak daripada jabatan yang diperebutkan, dan karena bagi sebagian orang, jabatan merupakan segala-galanya, persaingan niscaya mungkin akan menggunakan uang dan/atau cara intimidasi dan ancaman kekerasan. Hukum berperan untuk mengatur persaingan yang **bebas, tertib, dan adil** antarpeserta pemilu. (02/UKUUP/19/11/15)

Pada data (26) terdapat kolokasi pada kata **bebas, tertib, dan adil** menunjukkan kolokasi yang memiliki asosiasi tertentu yaitu syarat-syarat peserta pemilu.

#### **f. Ekuivalensi**

Ekuivalensi adalah hubungan kesepadanan antara satuan lingual tertentu dengan lainnya dalam sebuah paradigma . Dalam wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kompas* ditemukan ekuivalensi pada data (27) berikut ini.

(27) **Pemilihan** kepala daerah serentak untuk pertama kalinya akan digelar pada Desember 2015. Waktu yang sangat singkat untuk mempersiapkannya. **Pilihan** pilkada serentak merupakan respon atas jalannya pilkada langsung selama ini yang bergantung pada priode kepemimpinan masing-masing di tiap daerah otonomi. (01/PSRO/03/11/15)

Pada data (27) terdapat kata-kata yang berasal dari kata dasar yang sama , yaitu **pemilihan** dan **pilihan** dari dasar kata pilih.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pada surat kabar *Kompas* terutama pada kolom *Opini* cenderung banyak menggunakan penanda kohesi berupa konjungsi untuk membentuk sebuah wacana yang kohesif. Penanda kohesi gramatikal terdiri atas pengacuan persona, pengacuan demonstratif, substitusi, ellipsis, dan konjungsi. Frekuensi terbanyak pada penanda kohesi gramatikal adalah konjungsi.

Penanda kohesi leksikal terdiri atas sinonimi, antonimi, hiponimi, repetisi, kolokasi, dan ekuivalensi. Frekuensi terbanyak pada penanda kohesi leksikal.

Saran bagi mahasiswa menulis karya sastra atau nonsastra sebaiknya mahasiswa lebih memperhatikan penggunaan perangkat kohesi, karena penggunaan kohesi dalam tulisan dapat berpengaruh kepada para pembaca. Saran bagi penulis penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi para penulis dalam mengembangkan bahasa, khususnya penggunaan perangkat kohesi. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian lain tentang kohesi dengan kajian yang berbeda dan sumber yang berbeda pula..

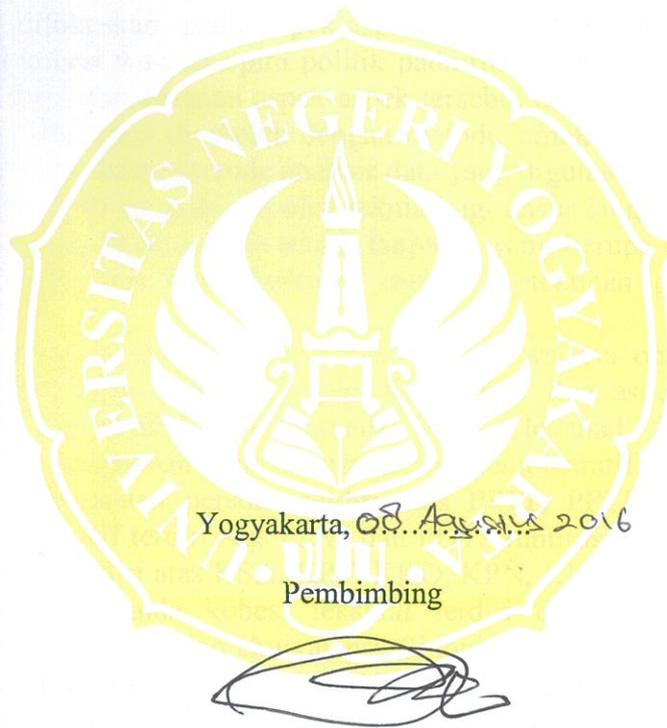
## DAFTAR PUSTAKA

- Akhadiah, Sabarti dkk. 1991. *Pembinaan Kemampuan Menulis*. Jakarta: Erlangga.
- Baryadi, Praptomo. 2002. *Dasar-Dasar Analisis Wacana Dalam Ilmu Bahasa*. Yogyakarta: Pustaka Gondho Suli.
- Bloor, T & M, Bloor. (1995). *The Functional Analysis of English*. New York: Arnold.
- Brown, Gillian dan George Yule. 1996. *Analisis Wacana*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chaer, Abdul. 2007. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djajasudarma, Fatimah. 2006. *Metode Lingistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Darma, Yoce Aliah. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya.
- Halliday, M.A.K dan R, Hasan. (1976). *Cohesion in English*. London: Longman.
- \_\_\_\_\_. (1992). *Bahasa, Konteks, dan Teks. Aspek-Aspek Bahasa Dalam Pandangan Semiotik Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Keraf, Gorys. 2004. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Keraf, Gorys. 1977. *Komposisi*. Flores: Nusa Indah.
- Mahsun. 2007. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moeliono, Anton M. (ed. al). 1992. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Perum Blai Pustaka.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana. 2005. *Kajian Wacana: Teori, Metode dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Olii, Helena. 2007. *Opini Publik*. Jakarta: PT Indeks.
- Rani, Abdul , Bustanul Arifin, dan Martutik. 2006. *Analisis Wacana: Sebuah Kajian Bahasa dalam Pemakaian*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sudaryanto. 1988. *Metode Linguistik Bagian Pertama: Ke Arah Memahami Metode Linguistik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- \_\_\_\_\_. 1988. *Metode Linguistik Bagian Kedua: Metode dan Aneka Teknik Pengumpulan Data*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisa Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sumarlam, Agnes Adhani, A. Indratmo. 2004. *Analisis Wacana: Iklan, Lagu, Puisi, Cerpen, Novel, Drama*. Bandung: Pakar Raya.
- Tarigan, Henry Guntur. 2009. *Pengajaran Wacana*. Bandung: Angkasa.
- Wiyanto, Usul. 2006. *Terampil Menulis Paragraf*. Jakarta: Grasindo

## PERSETUJUAN

Artikel *E-Jurnal* yang berjudul *Kohesi Wacana Politik Pada Rubrik Opini Surat Kabar Harian Kompas* ini disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.



Yogyakarta, 08 Agustus 2016

Pembimbing

Dr. Prihadi, M. Hum.

NIP: 19630330 199001 1 001